



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUR ATIK
2. Jabatan : DIREKTUR RISET, HILIRISASI DAN PKM
3. NHK : 1004740

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m²/98 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m²/100 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m²/90 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m²/21 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 821 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 604 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 515.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, CITROEN C3 AIRCROSS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000



3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.465.000.000
III. HUTANG	Rp.	3.095.468.891
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.369.531.109

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.